

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Pemerintah kota Surabaya Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Kendala dalam proses penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya terutama lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu akuntansi sektor publik.
3. Penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tahun 2019 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatanya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005.
4. Penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena ekuitas yang disajikan belum sesuai dengan PSAP Nomor 1 ayat 84 PP Nomor 71 Tahun 2010 karena penyajiannya masih terbagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005. Namun untuk penyajiannya aset dan kewajiban telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

#### **3.2 Saran**

1. Untuk menerapkan PP No.71 Tahun 2010 Pemkot Surabaya perlu mengkaji ulang laporan keuangan agar menjadi efektif.
2. Kiranya untuk anggaran berikutnya, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya harusnya sudah menerapkan PP No.71 tahun 2010 sejak disahkannya peraturan baru.
3. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebaiknya Pemkot Surabaya mengadakan pelatihan bagi pegawai khususnya dibagian keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan dan dapat menggunakan aplikasi SIMDA dengan versi terbaru yang sistem pencatatanya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggawirya, Erhans*, 2000. **Sistem Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia Edisi Pertama**. Jakarta : PT.Ercontara Rajawali.
- Annisarahm*, 2008. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Salemba Empat.
- Ahmad Yani* ,2008,**Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia**.: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ciclia,v.s Endah*. 2012. **Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa .Skripsi**. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Darise,Nurlan*.2009. **Akuntansi Keuangan Daerah ( Akuntansi Sektor Publik )** Pt.Indeks.Jakarta
- Halim,Abdul*.2013. **Akuntansi Keuangan Daerah.Edisi Keempat**.Salemba Empat.Jakarta
- Indiantoro .Nur dan Bambang Supomo*.1999. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen Yogyakarta**: BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo*,2009.**Akuntansi Sektor Publik**.Andi.Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2012 **Tentang Perubahan Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**. Jakarta
- Republik Indonesia* .2006. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah**. Jakarta
- Republik Indonesia* .2010. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**, Jakarta.
- Republik Indonesia*.2013. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah**. Jakarta .
- Sari. Tina Fatma* ,2012. **Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Sekertariat Daerah Provinsi Bengkulu**. UNIVED .Bengkulu
- Tim Penyusun.2019. **Buku Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Program Sarjana (S1)**. FEB Untag. Surabaya

